

## ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

**Fitri Mahyuni Nasution<sup>1</sup>, Hasnah Juniarni Nasution<sup>2</sup>, Rachmani Tarigan<sup>3</sup>**

Email: hasnahjuniarninasution@students.polmed.ac.id,

Fitrimahyuninasution@students.polmed.ac.id rachmanitarigan@students.polmed.ac.id

**ABSTRAK** Studi ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Samosir Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kab. Samosir Tahun Anggaran 2019. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, tinjauan kepustakaan, serta mengakses web dan situs-situs terkait. Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan Pemerintah daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD. Hasil menunjukkan desentralisasi fiskal dikategorikan sangat kurang, tingkat ketergantungan daerah dikategorikan rendah, Tingkat kemandirian daerah dikategorikan rendah, dan efektivitas PAD cukup efektif, Efisiensi PAD sudah efisien.

**KATA KUNCI** *pemerintah daerah, kinerja keuangan, analisis rasio.*

**PENDAHULUAN** Pemerintah daerah yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya secara berkala. Laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut disusun berdasarkan aturan yang berlaku untuk dinilai keberhasilannya atau tidak dalam menjalankan tugas yang diemban. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melihat dan menilai kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya (Siti Farida & Nugraha, 2019)

Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka mengetahui kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. (Mahmudi, 2016)

Pengukuran kinerja pemerintahan daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menganalisis laporan keuangan akan diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah terdapat peningkatan

<sup>1,2,3</sup> adalah mahasiswa Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Negeri Medan

atau penurunan dalam setiap tahunnya. Selain itu, dengan dianalisisnya laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan kinerja keuangan tahun berikutnya dapat lebih baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Anshori, 2019)

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diharapkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam suatu daerah. Pengukuran kinerja bersumber dari informasi keuangan seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat.

Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas sebuah laporan keuangan, maka kegiatan analisis laporan membutuhkan teknik atau cara tertentu yang tepat supaya kegiatan analisis ini dapat berguna bagi para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan. Ada beberapa teknik untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu diantaranya analisis varians, analisis rasio, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediksi. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan perhitungan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016).

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mahmudi (2010), ada lima rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu:

### 1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi dari PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rumus untuk menghitung derajat desentralisasi fiskal ialah:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Sumber: Mahmudi (2007)

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

Tingkat Desentralisasi Fiskal merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Bisma, 2010)

2. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal/luar baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah dari pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rumus untuk menghitung h ketergantungan keuangan daerah ialah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Daerah

Presentase PAD terhadap TPD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

3. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010). Rumus untuk menghitung Kemandirian daerah ialah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010).

Halim (2004) memperkenalkan empat pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola hubungan delegatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

4. Rasio efektivitas PAD, dimana ciri dari rasio ini menekankan pada kapabilitas pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan PAD yang berkaitan dengan target yang sebelumnya telah direncanakan dan ditetapkan. Target ini tentunya atas dasar pertimbangan potensi dan kemampuan riil daerah tersebut. Rasio efektivitas ini untuk PAD ini bisa dihitung dengan cara perbandingan antara pendapatan PAD yang terealisasi dengan pendapatan PAD yang mencapai target (Mahmudi, 2016). Sebagaimana tabel rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100$$

Tabel 4 Tingkat Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-90%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2016)

5. Rasio efisiensi PAD, dimana rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dianggap Efisien apabila dalam melakukan aktivitas memperoleh rasionya kurang dari satu atau di bawah 100%. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan baik bila rasio efisiensi keuangan daerah bernilai kecil. (mardatsmo, 2013 :112). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 5 Kriteria Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100 %	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber: Mahsun (2011:187)

## METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di LKPD Kab. Samosir Tahun Anggaran 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kab. Samosir Tahun Anggaran 2019. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, tinjauan kepustakaan, serta mengakses web dan situs-situs terkait. Analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan Pemerintah daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Samosir Tahun 2019 maka derajat desentralisasinya adalah:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$\begin{aligned} \text{Derajat Desentralisasi} &= \frac{\text{Rp.60.497.449.963,09}}{802.686.254.059,35} \times 100\% \\ &= 7,5\% \end{aligned}$$

Jika dilihat Tabel 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal yang ada pada Pemerintahan Daerah Samosir dikategorikan sangat kurang.

2. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Samosir Tahun 2019 maka Rasio Ketergantungannya keuangan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \\ \text{Rasio Ketergantungan Daerah} &= \frac{90.953.371.000,-}{802.686.254.059,35} \times 100\% \\ &= 11,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 2 kriteria penilaian tingkat ketergantungan daerah Pemerintah Daerah Samosir pada tahun 2019 dikategorikan rendah.

3. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Samosir Tahun 2019 maka Rasio Kemandirianya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \\ \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{60.497.449.963,09}{816.915.639,091} \times 100\% \\ \text{Rasio Kemandirian} &= 7,40\% \text{ (Instruktif)} \end{aligned}$$

Jika Tabel 3, kriteria penilaian tingkat kemandirian daerah Pemerintah Daerah Samosir pada tahun 2019 dikategorikan rendah, yang berarti Ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pemerintah pusat masih sangat dominan.

4. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh diperoleh dari Pemerintah Daerah Samosir pada tahun 2019 maka rasio efektivitasnya adalah:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{60.497.449.963,09}{64.942.653.826,83} \\ &= 93,15\% \end{aligned}$$

Jika dilihat Tabel 4 Rasio Efektivitas efektivitas PAD dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Samosir adalah 93,15% yang berarti Cukup Efektif.

5. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Samosir pada tahun 2019 maka Rasio Efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi PAD} &= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \% \\ \text{Rasio Efisiensi PAD} &= \frac{695.293.860.942}{885111158054.09} \times 100 \% \end{aligned}$$

Jika dilihat Tabel 5 Rasio Efisiensi PAD dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Samosir adalah 78,55 % yang berarti Efisien. yang artinya Pemerintah Daerah Samosir telah berhasil melakukan efisiensi atas biaya yang telah dikeluarkan.

**SIMPULAN** Berdasarkan dari hasil analisis dta, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dari segi derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Samosir dikategorikan sangat kurang.
2. Dari segi rasio kemandirian, ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap Pemerintah Pusat masih sangat dominan. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Samosir dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.
3. Dari sisi rasio efektivitas PAD, Pemerintah Kabupaten Samosir berada pada Cukup Efektivitas. Maka, Pemerintah Kabupaten Samosir telah cukup efektif dalam merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan.
4. Dari sisi rasio efisiensi PAD, Pemerintah Daerah Samosir telah berhasil melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan.

- RUJUKAN** Abdul Halim. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Selemba Empat.
- Anshori, Z. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 – 2018. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4 No. 2, J, 1113–1132. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.942>
- Bisma dan Susanto, 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFY-Yogyakarta.
- Siti Farida, A., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, 1. 11(2), 107–124.